

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2019-2023

Author:

Fadilah Fitri¹
Hurian Kamela²

Afiliation:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Terbuka^{1,2}

Corresponding email

044132983@ecampus.ut.ac.id
hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id



*This is an Creative Commons License This
work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Latar belakang: Latar belakang: Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mulai berlaku di Indonesia. Dalam sistem desentralisasi, kewenangan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan aturan di pusat dan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Analisis rasio keuangan sebagai penilaian efisiensi pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengelola keuangannya pada tahun anggaran 2019-2020

Metode penelitian: Penelitian berdasarkan metode deskriptif kuantitatif. Data sekunder yaitu Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banyumas yang dapat dilihat pada situs resmi Bkad Banyumas.

Hasil penelitian: Dari penelitian ini menjelaskan skor Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas masih rendah, sejalan dengan hasil Rasio Ketergantungan Daerah yang sangat tinggi dalam 5 tahun terakhir, pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, PAD yang dihasilkan belum optimal untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang ada.

Kesimpulan: Sebagai kesimpulan, keuangan pemerintah Kabupaten Banyumas sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Selama tahun anggaran 2019-2023, desentralisasi di Kabupaten Banyumas masih cukup rendah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat..

Kata kunci: Analisis Rasio Keuangan; Desentralisasi; Kemandirian Keuangan Daerah; PAD; Rasio Ketergantungan Daerah

Pendahuluan

Salah satu bagian terpenting dari pelaksanaan pemerintahan Indonesia adalah pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dan pendapatannya sendiri secara lebih efektif sebagai hasil dari desentralisasi keuangan daerah, yang melibatkan pengalihan kekuasaan fiskal dari pemerintah federal kepada mereka. Penyediaan layanan publik dan infrastruktur terkait erat dengan efisiensi dan keterbukaan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran mereka. Ada kesulitan unik yang dihadapi daerah Kabupaten Banyumas di Indonesia dalam hal mengelola anggaran dan pendapatannya. Kesehatan fiskal Pemerintah Daerah Banyumas dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dievaluasi menggunakan jenis studi ini. Dengan menggunakan analisis rasio, para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber dayanya. Agar dana yang ditetapkan dapat digunakan dengan baik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dengan cara yang murah dan efisien, hal ini sangat penting.

Pembiayaan daerah di Indonesia sebagian besar bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berasal dari sumber yang sah, termasuk pajak daerah, retribusi, dan hasil penyelenggaraan Pemda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian daerah menurut Rahmadani (2024) yang menyatakan bahwa PAD merupakan ukuran seberapa baik pemerintah memenuhi kebutuhan belanja operasional dan belanja modalnya. Dalam otonomi, peningkatan PAD menunjukkan daerah mampu untuk melakukan pembiayaan program pembangunan dan menyediakan fasilitas publik tanpa bantuan pemerintah pusat. Dengan PAD yang leboh besar, ketergantungan daerah akan dana dari pemerintah pusat akan berkurang.

Kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah diukur berdasarkan realisasi alokasi anggaran pemerintah daerah (Nurarifah et al., 2023). Dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya, penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja, khususnya untuk kepentingan publik. Selain itu, hal ini dapat menjadi tolok ukur bagi upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang (Sari et al., 2021). Untuk menilai kesehatan keuangan, digunakan analisis rasio keuangan. Kajian ini seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas dan efisiensi PAD.

Studi sebelumnya oleh Sari (2021) berdasarkan rasio derajat desentralisasi Kota Tangerang, terlihat bahwa kinerja keuangan kota mengalami peningkatan. Rasio ketergantungan dan rasio efektivitas PAD, Kota Tangerang dinilai efektif dengan rasio 117,31%. Informasi ini diperoleh dari Pemerintah Kota Tangerang. Dalam kajiannya terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Harahap (2020) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah sudah baik.

Sejak Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh predikat WTP tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penelitian ini difokuskan pada kinerja keuangan daerah. Selama 13 tahun, predikat ini diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD. Berdasarkan predikat WTP, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas sudah secara jujur, transparan, dan sesuai standar. Hal ini menarik bagi penulis mengenai bagaimana Kabupaten Banyumas dapat mempertahankan predikat tersebut selama tiga

belas tahun dengan berbagai tantangan yang ada, terutama tahun anggaran 2020-2023 saat ekonomi global dilanda krisis covid-19.

Studi Literatur

Laporan Keuangan

Semua transaksi keuangan dicatat dalam laporan keuangan (Prihadi., 2020). Laporan keuangan menunjukkan kinerja dan posisi. Tujuan laporan keuangan dalam PSAK No.1 Revisi 2017 yaitu untuk membantu pengguna membuat pilihan ekonomi yang tepat dengan informasi situasi keuangan organisasi. Kualitas laporan keuangan perusahaan atau organisasi dapat menjadi ukuran kesehatannya secara keseluruhan. Laporan keuangan organisasi yang baik adalah yang akurat dan konsisten (Aliah et al., 2022).

Kinerja Keuangan

Apabila laporan keuangan suatu organisasi memperlihatkan hasil usahanya di sektor keuangan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berkinerja secara keuangan (Putri, 2020). Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai standar guna meningkatkan kinerja organisasi, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pemulihan kinerja organisasi (Sari et al., 2021). Dalam konteks Pemerintahan Daerah, kinerja keuangan organisasi diukur melalui realisasi alokasi anggaran (Nurarifah et al., 2023). Selain itu, kinerja keuangan Pemda berdasarkan APBD (Ekowati & Fithariasri, 2020).

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah alat analitis yang menggambarkan hubungan yang dijelaskan secara matematis antara item dalam pelaporan keuangan selama periode waktu tertentu (Putri, 2020). Analisis keuangan bertujuan untuk melihat hasil pencapaian suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu baik dari segi harta, kewajiban, maupun modal yang dimiliki. Analisis keuangan juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang perlu diperbaiki, menemukan keunggulan perusahaan, yang digunakan untuk menilai tata kerja, dan mendorong perusahaan untuk bekerja lebih baik (Lase et al., 2022). Analisis rasio keuangan digunakan oleh manajemen sebagai pendoman untuk kemajuan organisasi, ini memungkinkan manajemen menilai seberapa baik kinerja keuangannya. Beberapa rasio yang termasuk dalam lingkup akuntansi sektor publik meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, efektivitas dan efisiensi PAD, ketergantungan keuangan daerah.

Metode Penelitian

Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan. Berdasarkan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran terperinci tentang suatu kejadian, bukan untuk menguji suatu teori. Pengumpulan dan analisis sistematis kumpulan data numerik menjadi ciri penelitian kuantitatif. Sehingga penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penggabungan dua elemen dari jenis penelitian diatas. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik suatu kejadian dengan tidak menguji hubungan sebab-akibat. Data sekunder yang digunakan adalah LRA-Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dengan akses situs resmi Bkad Banyumas.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengukur kesehatan keuangannya sendiri. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah, seseorang harus mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran. Hanya Pendapatan Daerah yang digunakan dalam rasio keuangan untuk menghitung LRA.

Rasio Derajat Desentralisasi (RDD)

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi disajikan pada tabel 1.

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	RDD	Keterangan
2019	686,805,512,326.17	3,434,925,995,303.17	19.99%	Rendah
2020	668,211,148,299.00	3,330,186,788,242.00	20.07%	Cukup
2021	761,991,440,173.00	3,487,722,900,410.00	21.85%	Cukup
2022	822,685,992,141.84	3,426,408,181,663.34	24.01%	Tinggi
2023	854,942,206,458.16	3,498,414,361,010.16	24.44%	Tinggi

Sumber : data diolah (2025)

Untuk tahun anggaran 2019–2023, Tabel 1 menampilkan hasil kajian Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Terjadi peningkatan PAD yang konsisten setiap tahunnya, namun total pendapatan daerah mengalami fluktuasi kecil meskipun secara total keseluruhan total pendapatan tetap stabil di atas Rp 3 triliun. Dapat diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Banyumas meningkat setiap tahunnya, dari hanya 19.99% pada tahun 2019 menjadi 24.44% pada tahun 2023. Ini menunjukkan peningkatan rasio PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, artinya pemerintah siap menjalankan otonomi daerah dengan adanya peningkatan penyelenggaraan desentralisasi. Pada tahun 2019 Kabupaten Banyumas berada di level rendah senilai 19.99% yang mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi level cukup hingga tahun 2021 yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam kemandirian keuangan daerah, kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2021-2022 pada level tinggi hingga 2023 yang menandakan bahwa Kabupaten Banyumas semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri melalui PAD. Peningkatan Rasio Derajat Desentralisasi mencerminkan kemajuan dalam desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah. Untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah federal dan meningkatkan kemampuan regional untuk mengembangkan daerahnya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKPD)

Kemampuan suatu daerah dalam menggunakan PAD untuk mendanai pembangunan daerah dapat dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerahnya. Salah satu cara untuk menentukan rasio ini adalah dengan membandingkan total pendapatan daerah dengan keseluruhan pendapatan transfer.

Tabel 2 menguraikan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana ditentukan oleh perkiraan penulis.

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	RKKPD	Keterangan
2019	2561772524235	3,434,925,995,303.17	74.58%	Sangat Tinggi
2020	2479870538123	3,330,186,788,242.00	74.47%	Sangat Tinggi
2021	2535638088327	3,487,722,900,410.00	72.58%	Sangat Tinggi
2022	2589697751952	3,426,408,181,663.34	75.58%	Sangat Tinggi
2023	2632443641584	3,498,414,361,010.16	75.25%	Sangat Tinggi

Sumber : data diolah (2025)

Dari tabel diatas diketahui Kabupaten Banyumas berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di skala Sangat Tinggi selama 5 tahun terakhir, dengan rata-rata senilai 74.52%. Jumlah tersebut sangatlah tinggi dan semakin bertambah setiap tahunnya, nilai tersebut turun sebesar 1.76% pada tahun 2022 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat dari total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer. Ketergantungan yang tinggi ini dapat menjadi indikasi kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah dan potensi risiko jika terjadi perubahan dalam kebijakan transfer pemerintah pusat. Ketergantungan ini berpotensi menghambat inisiatif daerah dalam pengembangan ekonomi dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Ini menunjukan bahwa Kabupaten Banyumas terus bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Kabupaten Banyumas belum bisa sepenuhnya menjalankan pembangunan daerah dengan mandiri. Ketergantungan pada dana transfer dapat membatasi kemampuan daerah untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan keuangan secara mandiri.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Hal ini menjelaskan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri operasi pemerintahannya. Sebagai contoh, studi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah melihat perbedaan antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan transfer dari pendapatan federal dan provinsi. Rasio pendapatan suatu daerah berhubungan positif dengan kapasitasnya untuk mendanai operasi pemerintahan. Untuk tahun anggaran 2019–2023, tabel 3 menampilkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Tahun Anggaran	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Ket	Pola Hubungan Pusat & Daerah
2019	686,805,512,326.17	2,561,772,524,235.00	26.81%	Rendah	Instruktif
2020	668,211,148,299.00	2,461,625,946,893.00	27.15%	Rendah	Instruktif
2021	761,991,440,173.00	2,535,638,088,327.00	30.05%	Rendah	Instruktif
2022	822,685,992,141.84	2,589,697,751,952.00	31.77%	Rendah	Instruktif
2023	854,942,206,458.16	2,632,443,641,584.00	32.48%	Rendah	Instruktif

Sumber : data diolah (2025)

Tabel ini menunjukkan hasil perhitungan yang dilakukan peneliti, bahwa Kabupaten Banyumas jika dianalisis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah meningkat setiap tahunnya sebesar 26.81%, 27.15%, 30.05%, 31.77%, dan 32.48% selama 5 tahun terakhir. Peningkatan PAD setiap tahunnya menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pada 2019 PAD sebesar Rp 689 miliar meningkat menjadi Rp 855 miliar pada tahun 2023. Meskipun RKKD meningkat secara bertahap hingga mencapai 32.48% di tahun 2023, peningkatan tersebut belum dapat dianggap mandiri secara finansial. Selama periode anggaran 2019-2023, Terdapat pola hubungan yang jelas di Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih besar daripada otonomi daerah, karena kabupaten tersebut masih kecil. Kabupaten Banyumas memerlukan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer.

Kesimpulan

Studi penulis menunjukkan bahwa keuangan pemerintah Kabupaten Banyumas sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Selama tahun anggaran 2019-2023, desentralisasi di Kabupaten Banyumas masih cukup rendah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat. Harapan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan potensi yang ada di wilayah tersebut dengan tujuan meningkatkan nilai PAD dan mewujudkan kemandirian daerah.

Referensi

- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan benar pada BUMDes. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2457-2462.
- Amilin. (2015). Analisis Informasi Keuangan. Universitas Terbuka
- Ekowati, S., & Finthariasari, M. (2020). Jurnal ilmiah akuntansi, manajemen & ekonomi islam (jam-ekis) volume 3, no. 1, januari 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (Jam-Ekis)*, 3(1), 1–14.
- Endang Larasati. (2021). Keuangan Publik. Universitas Terbuka
- Hilda Rossieta; Ali Muktiyanto; Ira Geraldina. (2020). Tata Kelola Sektor Publik. Universitas Terbuka.
- Lase, L. P. D., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 254-260.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN
- Mohamad Mahsun. (2021). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Universitas Terbuka
- Nurarifah, R., & Afrizal, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *JAKU (Jurnal Akuntansi*

- & Keuangan Unja) (E-Journal), 7(2), 93-104.
- Putri, B. G. (2020). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan. *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(1), 214-226.
- Rahmadini, D., Indriani, R., & Febriana, N., (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 8 Nomor 3, Juli 2024.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021, December). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas* (Vol. 4, No. 1, pp. 408-425). w
- Toto Prihadi. 2020. Analisis Laporan Keuangan, Konsep dan Aplikasi. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.